



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

FOKUS RAPBN 2023

Edmira Rivani

Analisis Legislatif Ahli Madya
edmira.rivani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang terjadi atau sebagai *shock absorber*. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan *sustainable* atau sehat, sehingga ini adalah kombinasi yang harus dijaga. Pada tahun ini, dunia diproyeksikan akan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan inflasi yang meningkat. Hal ini juga tercermin dari proyeksi *International Monetary Fund* (IMF) yang telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,6% ke 3,2% untuk tahun ini dan dari 3,6% menjadi 2,9% untuk tahun 2023. Artinya lingkungan global akan melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat. Menurut IMF, tahun ini inflasi akan naik ke 6,6% di negara-negara maju, sementara di negara-negara berkembang akan berada pada level 9,5%.

RAPBN 2023 akan difokuskan pada lima agenda utama. *Pertama*, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. *Kedua*, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. *Ketiga*, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. *Keempat*, pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. *Kelima*, mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

Tahun 2023 juga merupakan momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan *countercyclical* dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan. Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati.

Reformasi fiskal di sisi penerimaan dijalankan dengan optimalisasi pendapatan yang ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan. Dengan demikian, rasio perpajakan dapat meningkat dan memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. Di sisi belanja, dijalankan dengan peningkatan kualitas yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan *multiplier effects* yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan fiskal yang kuat disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3% hingga 6,0%, angka kemiskinan dalam rentang

7,5% hingga 8,5%, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108. Sementara dari sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan fleksibel dengan kehati-hatian melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara.

Postur anggaran masih dapat dirancang kembali. Hal yang perlu diingat, target defisit tak bisa diganggu gugat apabila pemerintah tidak ingin melanggar UU No. 2/2020. Artinya, pada tahun depan pemerintah wajib mengelola fiskal dengan lebih baik sehingga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Atensi DPR

Pemerintah harus mencermati berbagai dinamika yang terjadi di pasar global sehingga mampu menyusun postur fiskal dengan lebih adaptif. Adapun, faktor yang dicermati antara lain ketidakpastian di Eropa Timur akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta faktor cuaca yang berisiko mengganggu pasokan pangan sehingga inflasi berpotensi makin tinggi. Kondisi-kondisi tersebut akan mempersempit ruang fiskal, artinya pemerintah punya keterbatasan anggaran. DPR, melalui Komisi XI dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang baik serta menjaga daya beli masyarakat sehingga pengelolaan fiskal yang baik bisa terwujud.

Untuk menjaga defisit tetap berada di bawah 3%, Komisi XI juga perlu melakukan pengawasan terhadap pemerintah agar belanja negara tetap mampu mendukung berbagai prioritas nasional seperti pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, pembangunan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara, serta penyelenggaraan Pemilu.

Sumber

Bisnis Indonesia, 16 Agustus 2022;

Kontan, 16 Agustus 2022;

menpan.go.id, 16 Agustus 2022;

sindonews.com, 16 Agustus 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Juli Panglima S
Sri Nurhayati
Venti Eka Satya
Monika Suhayati
Rafika Sari

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022